

Pertunjukan Amal: Dana Awal Perjuangan Rakyat di Yogyakarta 1945-1947

IHZA ARVIANITA & YULI EKO BASUKI

Mahasiswa S1, Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada
Email Korespondensi: arvianita025@gmail.com

Abstract

This research discusses the existence of charity shows in Yogyakarta as one of the people's efforts to support the financial needs of independence struggle bodies. As the capital of the revolution, Yogyakarta's atmosphere was filled with patriotic spirit to defend independence, and its society supported the birth of struggle organizations. To finance their activities, people conducted fundraising activities, such as by organizing charity shows. This method was chosen because of its effectiveness in mobilizing charity-fund from society, since at the same time they also enjoyed entertainment. The shows were presented in the form of theater and cinema. From these charity shows, the collected funds were distributed to various independence struggle bodies such as People's Militia, Independence Funds Agency, and the Indonesian Red Cross (PMI).

Keywords:
independence
struggle
bodies;
charity shows;
struggle
funds;
revolution;
Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini mendiskusikan keberadaan pertunjukan amal di Yogyakarta sebagai salah satu upaya rakyat untuk membantu memenuhi kebutuhan finansial badan-badan perjuangan pada masa Revolusi Kemerdekaan. Sebagai ibu kota, Yogyakarta dilingkupi semangat untuk mempertahankan kemerdekaan dan masyarakatnya mendukung lahirnya badan-badan perjuangan di Yogyakarta. Untuk mendanai kegiatannya, rakyat melakukan penggalangan dana dengan mengadakan pertunjukan amal. Cara ini dipilih karena dianggap efektif untuk menggalang dana amal dari masyarakat, karena di saat yang sama mereka mendapatkan hiburan. Pertunjukan yang disajikan berupa sandiwara dan pemutaran film bioskop. Dari pertunjukan amal ini, dana yang terkumpul didistribusikan ke beberapa badan perjuangan seperti Laskar Rakyat, Fonds Kemerdekaan, dan Palang Merah Indonesia (PMI).

Kata kunci:
badan
perjuangan;
pertunjukan
amal; dana
perjuangan;
revolusi;
Yogyakarta

Pengantar

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, mendatangkan reaksi yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada yang menyambutnya dengan penuh ketidakpercayaan dan ada yang menyambutnya dengan suka cita. Reaksi ketidakpercayaan ini biasanya akan mengarah ke militansi massa. Sikap militan ini kemudian berubah menjadi Revolusi Sosial, seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Timur, Banten, Bogor, Jakarta, Priangan, Pekalongan, dan Solo (Nasution, 1977: 605). Sementara itu, rakyat Yogyakarta lebih memilih menyambut Proklamasi dengan penuh suka cita. Penyambutan kemerdekaan dengan suka cita ini kemudian menciptakan istilah “Gelora” yang menggambarkan ekspresi kebahagiaan rakyat Yogyakarta kala itu yang berupa tindakan-tindakan simbolis untuk mengungkapkan dukungan terhadap kemerdekaan (Winardi, 2017: 84).

Gelora kemerdekaan rakyat Yogyakarta yang memuncak pasca proklamasi berkembang menjadi sebuah semangat dan keberanian yang tidak dapat dibendung lagi. Hal itu sejalan dengan sikap politik dari Sultan Hamengku Buwana IX dan Paku Alam VIII, dua serangkai pemimpin tradisional dari Keraton Yogyakarta dan Pakualaman yang mendukung nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia. Mereka kemudian memanfaatkan gelora rakyat Yogyakarta ini untuk meyakinkan Sukarno dan Hatta guna menerima Yogyakarta sebagai ibu kota perjuangan. Kota Yogyakarta dengan rakyatnya menunjukkan kesiapan untuk mempertahankan kemerdekaan negara yang baru lahir ini. Hingga September 1945, jutaan rakyat berperan dalam gelombang revolusi yang mengharuskan mereka untuk memasuki sebuah era yang disebut dengan “bersiap”¹ (Winardi, 2017: 84).

Pada tahap ini, mulai dibentuk beberapa badan-badan perjuangan rakyat, seperti badan kelaskaran maupun badan sosial yang bergerak untuk membantu perjuangan. Badan-badan perjuangan inilah yang mewadahi rakyat untuk ikut serta dalam perjuangan. Keberadaan rakyat yang tergabung dalam badan-badan perjuangan pun menjadi penting dalam konteks perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada periode ini. Terlebih, mengingat bahwa jumlah personel tentara yang bergerak untuk mempertahankan keamanan negara pada saat itu masih sedikit di setiap daerahnya jika dibandingkan dengan jumlah personel badan-badan perjuangan rakyat yang berada di daerah-daerah itu.

Badan-badan perjuangan rakyat, yang jika diibaratkan masih belajar

1) Masa Bersiap adalah terminologi umum yang digunakan dalam historiografi Belanda untuk menyebut tahun-tahun awal Revolusi di Indonesia, yang ditandai kondisi abnormal berupa maraknya aksi kekerasan kolektif terhadap kelompok Eropa, Indo-Eropa dan kelompok-kelompok lain yang dianggap berpihak pada kolonial Belanda. Akan tetapi, ‘Bersiap’ yang dimaksud dalam artikel ini adalah merujuk pada situasi rakyat Yogyakarta yang mempersiapkan dirinya untuk melakukan pemindahan kekuasaan sesuai amanat proklamasi kemerdekaan.

merangkak ini, tidak hanya memerlukan dukungan moril saja, tetapi juga dukungan berupa materil. Salah satu sumber dana awal yang didapat oleh badan-badan perjuangan rakyat di Yogyakarta ini berasal dari hasil pertunjukan amal. Keberadaan pertunjukan amal sebagai sumber dana bagi badan-badan perjuangan rakyat di Yogyakarta pada 1945-1947 menjadi fokus dari penelitian ini. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab adalah sebagai berikut: mengapa kondisi Yogyakarta pasca proklamasi dapat melahirkan badan-badan perjuangan rakyat di Yogyakarta? apa saja badan-badan perjuangan rakyat yang lahir pada saat itu? mengapa pertunjukan amal dipilih sebagai salah satu sumber dana awal bagi badan-badan perjuangan rakyat di Yogyakarta? Siapa yang mengawali pertunjukan amal tersebut? Apa saja jenis pertunjukannya? Siapa saja yang mendapatkan dana dari pertunjukan amal?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kajian ini menggunakan berbagai sumber sejarah, baik primer maupun sekunder. Sumber primer dimaksud utamanya adalah surat kabar sezaman yang terbit di kota Yogyakarta, yaitu *Kedaulatan Rakjat*. Informasi-informasi dari sumber tersebut, selanjutnya dikombinasikan dengan berbagai literatur yang ekstensif terkait dengan tema yang sama. Diskusi akan diawali dengan uraian tentang kondisi kota Yogyakarta di awal kemerdekaan, kemudian dilanjutkan dengan kelahiran laskar-laskar rakyat, dan ditutup dengan pembahasan tentang dana perjuangan dan pertunjukan amal yang diselenggarakan untuk mendukung badan-badan perjuangan tersebut. Sebuah kesimpulan reflektif akan menutup seluruh rangkaian pembahasan kajian ini.

Yogyakarta di Awal Kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 menandai lahirnya sebuah bangsa baru, yaitu Bangsa Indonesia. Berbagai reaksi datang dari berbagai penjuru negeri, termasuk di Yogyakarta. Berita tentang proklamasi ini diterima di Yogyakarta oleh Kantor Berita Domei Cabang Yogyakarta pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 siang (Barahmus, 1985: 47). Berita ini kemudian disampaikan kepada rakyat Yogyakarta dengan berbagai cara. Kebetulan proklamasi kemerdekaan dibacakan pada hari Jumat, yang mana pada hari ini umat muslim menunaikan shalat Jumat. Momentum shalat Jumat ini sangat tepat untuk menyiarkan berita proklamasi. Seperti halnya yang terjadi di Masjid Besar (Alun-alun Utara) dan Masjid Pakualaman, di mana khatib shalat jumat di kedua masjid ini menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan dalam khutbahnya (Barahmus, 1985: 48). Selain disiarkan dalam khutbah Jumat, berita proklamasi ini disebarluaskan pula oleh Ki Hadjar Dewantara. Pada sore hari selepas shalat Jumat, ia memimpin arak-arakan sepeda bersama murid Taman Siswa untuk menyemarakkan semangat kemerdekaan di jalan-jalan besar dalam kota yang mereka lewati (Zuhdi,

2012: 136). Reaksi rakyat Yogyakarta saat pertama kali mendengar berita ini ialah bingung dan terkejut. Hal ini karena pada faktanya mereka masih melihat orang-orang Jepang berkuasa dan bendera *Hinomaru* masih berkibar. Akan tetapi, keterkejutan dan kebingungan ini tidak dirasakan oleh beberapa anggota *Hokokai* Yogyakarta (Soemardjan, 2009: 70). Hal ini dikarenakan anggota *Hokokai* Yogyakarta sering berhubungan dengan *Hokokai* Pusat di Jakarta. Berkat hubungan inilah, anggota *Hokokai* Yogyakarta dapat mengetahui situasi terkini yang terjadi di Jakarta. Baru lah dua hari setelah proklamasi dikumandangkan, harian *Sinar Matahari*² menerbitkan berita mengenai proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945 (Winardi, 2017: 83-84). Dengan terbitnya berita proklamasi di surat kabar, perlahan kebingungan dan keterkejutan rakyat mengenai kemerdekaan Indonesia pun memudar dan tergantikan oleh suka cita rakyat Yogyakarta. Pawai dilakukan di hampir seluruh Yogyakarta, serta sorak-sorai “merdeka” bergema hingga ke pelosok kampung.

Dalam kondisi euforia tersebut, Sultan Hamengku Buwana IX memainkan posisi yang cukup penting di Yogyakarta. Sebagai seorang raja Keraton Yogyakarta yang nasionalis, dia segera menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Dukungan Sultan tersebut, dapat dilihat dari kawat ucapan selamatnya atas terpilihnya Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden yang dimuat dalam Harian *Sinar Matahari* terbitan tanggal 19 Agustus 1945 (Gunawan dan Darto Handoko, 1983: 14). Pada hari yang sama pula, Sultan mengadakan pertemuan dengan kelompok-kelompok pemuda yang mewakili berbagai golongan, seperti golongan nasionalis, golongan agama, kelompok kepanduan, dan kelompok pemuda peranakan Tionghoa. Melalui pertemuan ini, sebenarnya Sultan telah melakukan tindakan preventif bilamana terjadi tindakan-tindakan liar di masyarakat di tengah perubahan besar dan mendadak yang sedang terjadi, melalui amanahnya kepada kelompok-kelompok pemuda tersebut untuk menjaga keamanan masyarakat (Barahmus, 1985: 48-49). Dari telegram ucapan selamat yang dikirim dan pertemuan yang diadakan oleh beliau dengan sejumlah kelompok pemuda, dengan jelas mencerminkan sikap pemimpin Yogyakarta ini.

Sikap ini semakin dipertegas dengan dikeluarkannya pernyataan resmi oleh Sultan Hamengku Buwana IX dan Paku Alam VIII pada 5 September 1945. Pernyataan tersebut berisi dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia yaitu:

“Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia.” pasal pertama dalam amanat Sultan Hamengku Buwono IX.”

“Bahwa Negeri Pakualaman yang bersifat kerajaan adalah Daerah

2) Salah satu harian yang terbit di Yogyakarta sejak masa Jepang. Di kemudian hari, surat kabar ini berubah nama menjadi *Kedaulatan Rakjat*.

Istimewa dari Negara Republik Indonesia” pasal pertama dalam amanat Paku Alam VIII (Soehartono, 2002: 35).

Dari amanat kedua raja tersebut, dapat diketahui bahwa Kasultanan dan Pakualaman secara gamblang menyatakan bahwa Yogyakarta merupakan bagian dari Republik Indonesia. Tentunya, posisi Kasultanan yang lebih superior dibandingkan dengan Pakualaman juga akan mempengaruhi legitimasi dan penerimaan rakyat terhadap sikap dan pernyataan politik tersebut. Terkait amanat Sultan untuk menjaga keamanan Yogyakarta, Rakyat memaknainya sebagai sebuah perintah untuk melakukan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Republik. Pada 21 September 1945, dilakukan pengibaran Merah Putih di *Tyookan Kantai* (kini Gedung Agung). Tempat ini merupakan kediaman dari pimpinan *Kooti Zimu Kyoku Tyookan* (salah satu pasukan polisi Jepang yang masih berada di Yogyakarta). Setelah peristiwa ini, banyak pemuda yang terbakar semangatnya dan mencoba merebut tempat-tempat yang semula diduduki Jepang. Puncaknya adalah ketika terjadi penyerangan terhadap Kotabaru pada 7 Oktober 1945 (Suwarno, 1995).

Sultan mengalami keresahan yang luar biasa menyaksikan gelora rakyat yang nampak mulai berubah menjadi suatu gerakan yang militan. Pasca penyerangan markas-markas tentara Jepang, banyak rakyat Yogyakarta memiliki senjata rampasan. Hal ini dirasa cukup membahayakan, mengingat hanya sedikit saja yang memiliki pengalaman menggunakan senjata. Bahkan ada salah satu pemuda yang sama sekali tidak mengerti cara menggunakan pistol, dengan penuh percaya diri ia menodong seorang Jepang untuk mau diserahkan ke pimpinan kampung (Suwarno, 1995). Orang Jepang ini pun ketakutan bukan main dan menuruti perintah pemuda tadi. Karena banyaknya cerita-cerita seperti itu beredar, akhirnya Hamengku Buwana IX bersama Paku Alam VIII mengajak semua rakyat yang terlibat dalam sejumlah aksi militan untuk berunding dan membentuk suatu badan perjuangan kelaskaran yang mewadahi rakyat-rakyat Yogyakarta yang ingin turut serta dalam perjuangan.

Sejak awal tahun 1946, posisi Yogyakarta menjadi sangat vital karena ditetapkan menjadi ibu kota Republik Indonesia menggantikan Jakarta, yang telah diduduki Tentara Belanda yang membonceng Sekutu, ditandai dengan hijrahnya Presiden dan Wakil Presiden ke Yogyakarta. Pada 6 Januari 1946, dilakukan upacara penyambutan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung Agung (*Kedaulatan Rakjat*, 4 Januari 1946). Hampir seluruh rakyat Yogyakarta memenuhi jalanan dari Pakualaman hingga ke Gedung Agung. Arak-arakan Presiden, Wakil Presiden, yang juga diiringi oleh beberapa menteri ini, disambut oleh sorak sorai kata “Merdeka!” di sepanjang jalan. Setelah ibukota resmi berada di Yogyakarta, kebutuhan akan badan-badan perjuangan yang harus siap bertugas menjaga keamanan atau pun menyokong perjuangan semakin tak dapat dielak lagi.

Kelahiran Badan-badan Perjuangan Rakyat

Bulan-bulan akhir di tahun 1945, rakyat Yogyakarta, terutama para pemuda, semakin terhanyut dalam kemelut dan gelora semangat kemerdekaan, sehingga disadari atau tidak membawa mereka masuk ke dalam situasi Revolusi. Terlebih ketika Yogyakarta resmi menjadi Ibukota Republik, semangat kemerdekaan ini disalurkan rakyat melalui berbagai badan-badan perjuangan yang mayoritas juga terbentuk pada akhir 1945. Di bawah ini dijelaskan kemunculan beberapa badan-badan perjuangan rakyat, seperti kelaskaran dan badan perjuangan yang bergerak untuk membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

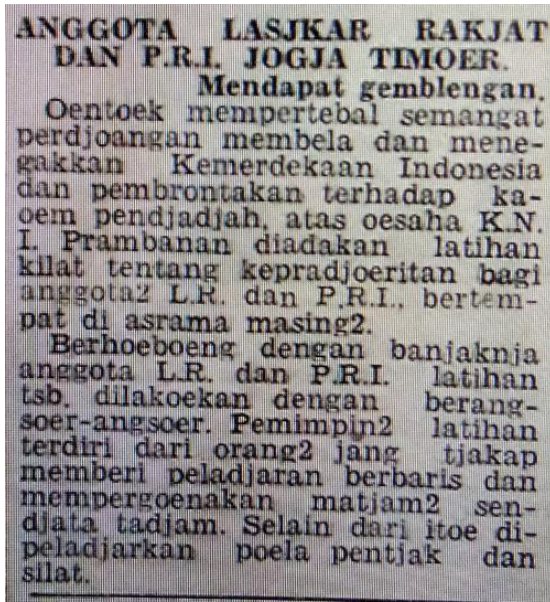
Laskar Rakyat Yogyakarta

Laskar Rakyat Yogyakarta dibentuk oleh Sultan Hamengku Buwana IX karena kekhawatirannya dalam melihat pergerakan rakyat yang semakin radikal sewaktu penyerbuan Kotabaru, terlebih ketika beliau mengetahui banyak rakyat yang memegang senjata rampasan. Akhirnya pada 26 Oktober 1945 Sultan mengeluarkan Maklumat No. 5 tentang pembentukan Laskar Rakyat sebagai pembantu Tentara Keamanan Rakyat. Maklumat ini ditandatangani oleh Sultan Hamengku Buwana IX, Paku Alam VIII, dan Moh. Saleh (Imran, 2012: 175). Tujuan didirikannya Laskar Rakyat ini ada empat, yaitu: (1) membantu mempertahankan Negara Republik Indonesia pada umumnya, Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya; (2) mempertahankan daerah kampung/desa terhadap musuh; (3) menjaga keamanan daerah kampung/desa; dan (4) membantu segala kepentingan rakyat yang membutuhkan banyak tenaga yang teratur (Imran, 2012: 185).

Kedudukan Laskar Rakyat ini ada di berbagai *kemantren* (wilayah setingkat kecamatan) di Yogyakarta, dengan pengurusnya yaitu kepala-kepala barisan yang ada di *kemantren* masing-masing. Sifat keanggotaan Laskar Rakyat ini bebas dan komando utama berada di tangan Sultan dan Paku Alam yang akan disampaikan oleh Dewan Pimpinan Laskar Rakyat. Dewan ini diisi oleh mantri pangreh praja, wakil KNI (Komite Nasional Indonesia), dan wakil Tentara Keamanan Rakyat, TKR (Imran, 2012: 186). Dengan dibentuknya Laskar Rakyat ini, setidaknya gelora semangat mempertahankan kemerdekaan rakyat Yogyakarta dapat memiliki wadah dan saluran yang jelas, termasuk untuk turut serta berjuang dengan menggunakan senjata api.

Laskar Rakyat ini pada awal-awal berdirinya diisi dengan kegiatan-kegiatan pelatihan. Pelatihan ini sangat diperlukan oleh para anggota yang mayoritas belum memiliki keahlian dalam berperang maupun menggunakan senjata api layaknya tentara profesional.

Dalam Figur 1 di atas, dilaporkan bahwa Laskar Rakyat melakukan latihan bersama dengan satuan badan kelaskaran lain, yakni PRI Jogja Timoer



Figur 1. Liputan Kegiatan Latihan Bersama Antara Laskar Rakyat dan PRI Jogja Timoer. Sumber: *Kedaulatan Rakjat*, 20 Desember 1945.

yang diprakarsai oleh KNI Prambanan. Adapun latihan-latihan yang diajarkan dalam kesempatan itu adalah cara menggunakan berbagai senjata tajam dan juga pencak silat. Selain itu, TKR juga terlibat dalam pelatihan anggota Laskar Rakyat ini, seperti yang terjadi di Segoroyoso, di mana TKR bergiliran diundang untuk memberikan pelatihan dasar kemiliteran bagi anggota laskar (Tashadi, 1992: 85).

Dalam Maklumat No. 5, sudah dijelaskan pula mengenai sumber pendanaan Laskar Rakyat ini. Seluruh dana kegiatan mereka akan diambil dari dana Rukun Kampung dan Rukun Desa (Imran, 2012: 176). Di luar itu, Laskar Rakyat berhak melakukan dana usaha guna mendukung jalannya pelatihan anggota dan kegiatan lainnya, seperti kongres anggota.

Fonds Kemerdekaan

Fonds Kemerdekaan dibentuk atas perintah dari pusat dan diketuai oleh Muhammad Hatta (To, 1991: 28) dan DR. H. R. Soeharto sebagai bendahara umumnya (Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 1988: 16). Sebenarnya fonds semacam ini sudah pernah didirikan pada masa Jepang dengan nama Fonds Perang (Ariyani, 2002: 46). Fonds ini bertugas untuk mengumpulkan dana guna menyokong Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Kemudian fonds ini didirikan kembali dengan nama Fonds Kemerdekaan untuk mengatasi permasalahan dana Revolusi Indonesia pada 6 September 1945 dan disusul pendirian cabang-cabangnya di wilayah Jawa dan Madura (Suwirta, 2015: 41). Hal ini sejatinya didasari atas kesadaran pemerintah, bahwa Revolusi Indonesia tidak hanya membutuhkan semangat kemerdekaan semata, tetapi juga dana. Fonds ini berfokus pada pengumpulan dana untuk kepentingan perjuangan, seperti logistik para pejuang dan juga persenjataan mereka. Fonds

Kemerdekaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sebab lembaga inilah yang menjadi satu-satunya sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai badan perjuangan pada bulan-bulan awal kemerdekaan Indonesia (Ariyani, 2002: 47).

Di Yogyakarta, Fonds ini diketuai oleh Mr. Jodi Gondokusumo (Soehartono, 2002: 58). Sementara menjabat sebagai bendahara dan logistik, berturut-turut BRA Hadikusumo dan RA Siti Sudaryati Djodi Gondokusumo (Suwirta, 2015: 41). Fonds Kemerdekaan cabang Yogyakarta ini bermarkas di Kampung Sayidan (Barahmus, 1985: 60). Sementara untuk keanggotaan fonds ini bersifat terbuka dan bebas. Rakyat sangat diperbolehkan untuk bergabung dalam upaya pencarian dana atau pun hanya ingin menghibahkan sebagian hartanya untuk kepentingan perjuangan. Dana hibah ini memang sejak awal sudah diterima oleh Fonds Kemerdekaan atau sering disebut sebagai Fonds Perjuangan, dan sebagian lain masih ada yang menyebutnya sebagai Fonds Perang, karena tugasnya yang mencari dana untuk kepentingan perang. Pemasukan hibah yang diterima oleh Fonds ini dapat dilihat dalam laporan pemasukan keuangan yang biasanya berjudul "Dompot Istimewa", seperti di bawah ini yang diterbitkan di Harian *Kedaulatan Rakjat*.

"Dompot Istimewa"	
Fonds Perjuangan Rakja	
Mr. K. R. T. Nitidipoero	100
Jogja	100
M. B. Tiokrodusastro	100
Jedonegaran no. 2	100
Perwani Minggu	100
Digdopawiro, Prawiro-	500
taman no. 98	
Peg. Perseroan Pertang-	100
goengan Djiwa "Retas	
Djwanggo" Ngampi-	
lan 35, Jogja	100
Seorang Tjarik desa	100
Gondowoloeng	100
Nj. Soeparto, Kadipaten	100
2/145	
Perwani Djonegaran,	100
Jogja	
P. K. N. Kroempoet,	200
Banjoemas	
Perwani Ngampilan,	100
Jogja	
Para Peg. Tepas, Dekar-	150
an 35, Djiwa Pemoeda	
Poeteri Perwani	100
Cepala Boekoen Soma,	
seloeroeh Kapanewon	
Ngemplak	528.20
lanting K.N.I. Kepoeh	
sari, Tjankringan,	
Sleman	118.89
anitia Pasar Derma,	
Godaan	140
ladjallah, Re-	
volosa Pemoeda	500
	3.077.09
	Moestjir.

Figur 2. Daftar Pemasukan Fonds Perjuangan Rakyat yang dimuat dalam kolom Dompot Istimewa. Sumber: *Kedaulatan Rakjat*, 24 Desember 1945.

Badan Perjuangan Sosial: Palang Merah Indonesia

Badan-badan perjuangan rakyat pada masa Revolusi Kemerdekaan tidak hanya terbatas pada badan yang berjuang dengan angkat senjata, tetapi juga mereka yang berjuang di bidang kemanusiaan. Pada periode Revolusi ini terjadi sejumlah peperangan yang menyebabkan jatuhnya korban yang tidak sedikit. Tentu korban-korban ini perlu dievakuasi dan ditolong. Dalam hal tersebut, keberadaan badan-badan perjuangan rakyat yang bergerak di bidang sosial menjadi penting. Berikut ini penulis akan menjelaskan salah satu badan perjuangan di bidang sosial, yakni Palang Merah Indonesia atau PMI.

Sebenarnya badan atau organisasi sejenis ini sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Namun baru pada 3 September 1945, wacana mengenai pembentukan Palang Merah Indonesia (PMI) muncul kembali setelah



Figur 3. PMI Yogyakarta membantu mengevakuasi korban saat penyerbuan Kotabaru. Sumber: Suhartono, 2002: 60.

sebelumnya wacana ini ditolak. Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan saat itu, yakni dr. Buntaran Martoatmodjo untuk membentuk sebuah lembaga palang merah untuk menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia ini memang nyata. Lalu pada 17 September 1945 Palang Merah Indonesia diresmikan kehadirannya dengan Moh. Hatta sebagai ketuanya (Palang Merah Indonesia, 2011).

Setelah diresmikan keberadaannya, PMI pusat langsung memerintahkan pembentukan cabang-cabang di tiap daerah, dan Pemerintah Daerah Yogyakarta langsung melaksanakan perintah tersebut. PMI di Yogyakarta beranggotakan orang-orang yang dulunya pernah mengikuti organisasi kepalang-merahan pada masa penjajahan Belanda dan Pendudukan Jepang. Namun tak hanya itu, organisasi ini juga diikuti oleh para pemuda yang belum berpengalaman namun ingin ikut serta membantu korban-korban perang. PMI di Yogyakarta memiliki tugas utama untuk memberikan perawatan, pengobatan, dan memastikan kesehatan para pejuang, khususnya TKR (Soehartono, 2002: 59). Untuk masalah pendanaan, PMI mengadakan berbagai acara amal maupun menerima hibah dari berbagai kalangan. Dana-dana ini umumnya digunakan untuk kebutuhan membeli obat-obatan dan alat medis untuk menangani korban-korban perang.

Kerja awal PMI Yogyakarta ini sangat terlihat saat terjadi peristiwa penyerbuan Kotabaru. Mereka dengan sigap mengevakuasi korban-korban perang. Dari foto pada figur 3 di atas, dapat dilihat jika PMI memberikan pertolongan pertama kepada korban penyerbuan Kotabaru.

Dana Perjuangan dan Pertunjukan Amal

Revolusi Indonesia itu merupakan proses politik yang sangat mahal, yang

membutuhkan sokongan dana besar dan tidak hanya sekedar nyali berani mati semata. Terlebih pada awal kemerdekaan, saat Republik Indonesia masih merupakan negara baru yang tidak memiliki sumber keuangan yang tetap. Maka dari itu, diperlukan kerja bahu-membahu untuk mendanai Revolusi ini. Begitulah kondisi yang terjadi di daerah-daerah, tak terkecuali di Yogyakarta.

Di Yogyakarta, periode awal Revolusi melahirkan badan-badan perjuangan rakyat untuk mewartakan rakyat yang ingin ikut serta dalam perjuangan. Hal ini membuat perjuangan rakyat di Yogyakarta lebih terstruktur dan terorganisasi dengan baik, karena mereka bergabung dalam satuan komando-komando yang jelas. Kelahiran badan-badan ini tentu perlu didukung dengan dana yang tidak sedikit. Berbagai upaya dilakukan baik oleh rakyat yang tidak ikut bergabung dalam badan-badan perjuangan tersebut maupun oleh tiap-tiap badan itu sendiri untuk mencari dana guna membiayai kegiatan mereka. Beberapa upaya yang mereka tempuh yakni dengan mengadakan berbagai acara amal dan mengadakan undian uang. Mereka juga sangat terbuka terhadap pemberian dana hibah maupun sumbangan berupa logistik, seperti bahan makanan dan obat-obatan.

Dalam upaya pencarian dana ini, pers memiliki peran yang tidak kecil. Salah satu pers di Yogyakarta yang cukup penting di sini adalah *Harian Kedaulatan Rakjat*. Harian ini pertama kali terbit pada 27 September 1945 dan berkantor di Jalan Mangkubumi No. 22 Yogyakarta (Suwirta, 2015: 144). Harian ini menjadi penting karena hampir di setiap harinya menerbitkan info-info penggalangan dana untuk perjuangan dan sesekali menerbitkan pemasukan keuangan dari Fonds Kemerdekaan, yang mana memang badan tersebut berfokus dalam penggalangan dana perjuangan yang nantinya disalurkan ke badan-badan perjuangan lain, seperti kelaskaran dan PMI, serta digunakan pula untuk membiayai berbagai kepentingan lain, seperti diplomasi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan.

Setidaknya pada bulan-bulan pertama terbitnya *Kedaulatan Rakjat* hingga akhir tahun 1945, ditemukan beberapa iklan penggalangan dana

Tabel 1. Dana Perjuangan dan Pendistribusiannya hingga Agustus 1946.

No	Kegiatan	Alokasi Dana
1	Perjuangan Kemerdekaan	f6.551.571,-
2	Pemerintahan	f2.375.370,-
3	Komite Nasional Indonesia	f1.645.355,-
4	Palang Merah Indonesia	f1.105.693,-
5	Sosial	f500.505,-
6	Pendidikan	f253.629,-
	Jumlah	f14.432.123,-

Sumber: *Kedaulatan Rakjat*, 26 Agustus 1946

untuk perjuangan, termasuk iklan pertunjukan amal. Namun pada tahun 1945, tidak diketahui secara pasti berapa banyak jumlah dana yang masuk untuk badan-badan perjuangan. Pada Agustus 1946, baru dapat diketahui bahwa dana untuk perjuangan ini telah terkumpul dalam nominal yang sangat besar, yaitu f14.432.123,-. Jumlah dana yang sangat besar tersebut kemudian didistribusikan untuk berbagai kegiatan sebagaimana bisa dilihat dalam Tabel 1.

Dari Tabel 1 di atas, dapat dipahami bahwa alokasi paling besar diberikan untuk perjuangan kemerdekaan, utamanya digunakan untuk membeli senjata, kepentingan latihan, pembelian logistik, dan lain-lainnya. Namun sayangnya, hingga kini tidak dapat ditemukan publikasi lebih lanjut mengenai angka pasti dari rincian pengeluaran masing-masing kegiatan yang mendapat alokasi itu.

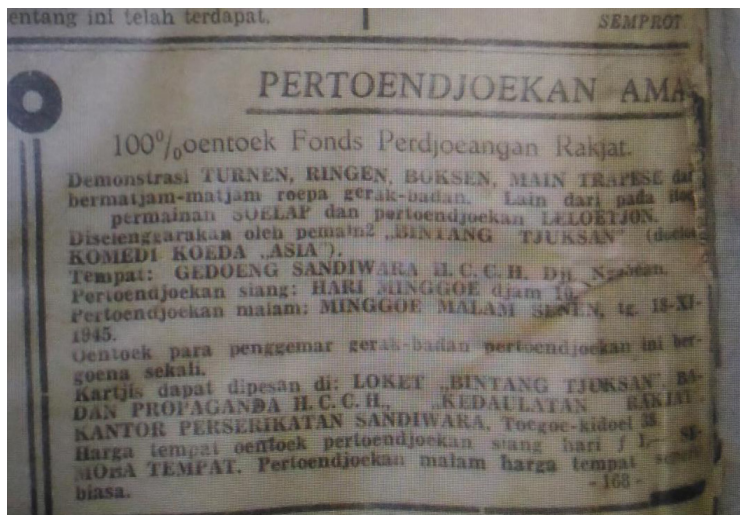
Pertunjukan Amal: Awal dan Perkembangannya

Pertunjukan amal merupakan sebuah gelaran hiburan yang didasari untuk penggalangan dana atau amal. Pertunjukan amal ini dimanfaatkan oleh rakyat dan badan-badan perjuangan di Yogyakarta untuk menggalang dana pada awal kemerdekaan hingga sekitar tahun 1947. Pemilihan ini memiliki alasan yakni, dengan pertunjukan amal, publik tidak hanya diminta untuk beramal, tetapi juga sekaligus mendapat hiburan berupa pertunjukan. Kemunculan pertama pertunjukan amal ini dimuat dalam sebuah iklan di Harian *Kedaulatan Rakjat* edisi tanggal 10 November 1945.

Pertunjukan amal pertama ini diselenggarakan pada 14 November 1945. Jika dilihat dari iklan tersebut, maka dapat diperkirakan bahwa penyelenggara pertama dari pertunjukan amal di Yogyakarta adalah Rukun Kampung Djogonegaran. Pertunjukan amal pertama ini merupakan sebuah sajian pertunjukan lakon sandiwaras dengan cerita yang dibawakan "Pemberontakan Rakjat". Separuh dari dana hasil dari pertunjukan ini akan diberikan kepada



Figur 4. Iklan Pertunjukan Amal pertama di Harian *Kedaulatan Rakjat*. Sumber: *Kedaulatan Rakjat* 10 November 1945.



Figur 5. Iklan Pertunjukan Amal berupa Sulap, terbit di Harian *Kedaulatan Rakjat*. Sumber: *Kedaulatan Rakjat*, 17 November 1945.

Fonds Kemerdekaan dan separuhnya lagi untuk Laskar Rakyat Djogonegaran. Selain pertunjukan sandiwara, hiburan lain yang disajikan dalam pertunjukan amal pada tahun kesempatan itu ialah pertunjukan sulap.

Pada tahun berikutnya, pertunjukan amal menjamur. Banyak diselenggarakan pertunjukan amal sebagai upaya penggalangan dana untuk perjuangan. Hal ini dapat terjadi karena disinyalir adanya himbauan dari POSI (Persatoean Oesaha Sandiwara Indonesia) supaya badan-badan perjuangan mengadakan pertunjukan amal (*Kedaulatan Rakjat*, 5 Februari 1946). Himbauan ini bukan tanpa alasan. POSI menilai bahwa pertunjukan amal yang diselenggarakan sebelumnya, mendapat sambutan yang baik dari masyarakat dan keuntungan yang besar.

Pada tahun 1946 berkembang berbagai jenis pertunjukan amal. Tidak hanya berupa sandiwara dan sulap saja yang disajikan, tetapi ada juga pemutaran film, seperti yang diiklankan pada 16 Januari 1946 oleh Harian *Kedaulatan Rakjat*. Film yang diputar dalam pertunjukan amal ini berjudul "The Thief of Bagdad". Film ini akan diputar di bioskop Indra dan Rex pada 17 Januari 1946, dengan pendapatan yang diperoleh akan dialokasikan 100% untuk Fonds Kemerdekaan. Selain pemutaran film, pertunjukan amal lainnya yang muncul pada tahun ini berupa pertunjukan musik keroncong. Pertunjukan keroncong ini, misalnya, digelar pada 19-20 Maret 1946 bertempat di Gedung Indra, yang mana sebesar 10% dari pendapatannya akan diberikan kepada badan kelaskaran (*Kedaulatan Rakjat*, 13 Maret 1946).

Tidak hanya untuk Fonds Kemerdekaan dan kelaskaran, terdapat pula sejumlah pertunjukan amal yang dananya diperuntukkan bagi PMI. Beberapa pertunjukan yang mengalokasikan dananya untuk PMI dimuat dalam Tabel 2 berikut.³

3) Data ini diambil dari *Kedaulatan Rakjat* yang terbit pada 15 Februari 1946, 22

Tabel 2. Pertunjukan amal dalam rangka penggalangan dana untuk PMI

No	Jenis Pertunjukan	Tema Pertunjukan	Pelaksanaan	Alokasi untuk PMI
1	Sandiwara	Semarang	9, 10 dan 17 Februari 1946	25%
2	Sandiwara	–	23-24 Februari 1946	50%
3	Sandiwara	Merah Poetih, Tetap Disitoelah Tempatmoe	25-27 Februari 1946	20%
4	Film	If I were King	4 Februari 1946	15%
5	Sandiwara	Matinja Harjo Penangsang	6 Maret 1946	15%
6	Sandiwara	Poesaka Mataram	22 Maret 1946	15%
7	Sandiwara	Arijo Penangsang	30-31 Maret 1946	15%
8	Sandiwara	Troenodjojo	31 Maret dan 1 April 1946	15%

Sumber: *Kedaulatan Rakjat*, 15, 22 Februari 1946; 1, 20 Maret 1946.

Keberadaan pertunjukan amal untuk menyokong usaha perjuangan yang dilakukan oleh rakyat, baik yang tergabung dalam badan-badan perjuangan maupun tidak, memang bukan sekadar bualan belaka. Pertunjukan amal ini memang benar-benar menghasilkan dana yang cukup tinggi untuk mendanai perjuangan. Terlihat dari laporan pemasukan keuangan Fonds Kemerdekaan yang diterbitkan oleh Harian *Kedaulatan Rakjat* pada 25 Maret 1946 pada Figur 6.

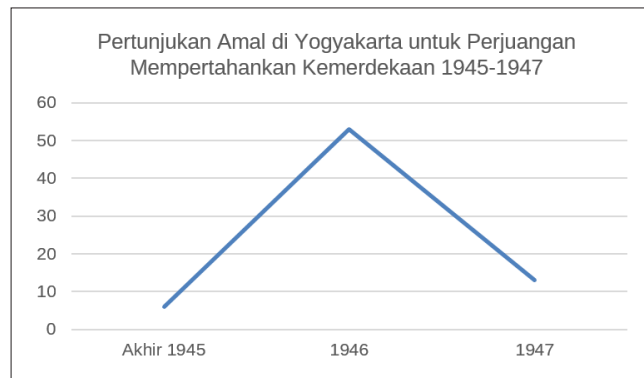
Dalam laporan tersebut dapat diketahui bahwa sumber dari pertunjukan amal merupakan penyumbang dana paling besar saat itu, yakni sebesar f715,34,-. Tahun 1946 merupakan tahun kejayaan bagi usaha pertunjukan amal, yang mana selama tahun ini setidaknya terdapat sebanyak 53 pertunjukan amal yang ditujukan untuk penggalangan dana perjuangan kemerdekaan. Kejayaan usaha pertunjukan amal pada tahun ini dikarenakan adanya hasrat rakyat Yogyakarta yang tidak dapat lagi dibendung dalam ikut serta upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia (*Kedaulatan Rakjat*, 28 Februari 1946). Namun sayangnya, pertunjukan amal yang ditujukan untuk dana perjuangan ini rupanya hanya berjaya pada 1946 saja. Pada tahun 1947, popularitas pertunjukan amal ini mengalami penurunan, seperti dapat dilihat pada Figur 7.

Bisa jadi penurunan yang terjadi pada 1947 terjadi karena badan-badan perjuangan rakyat di Yogyakarta yang sudah mampu bertahan dengan sumber dana yang lain, seperti hibah dari para dermawan. Selain itu, bisa jadi juga dikarenakan pada tahun 1947 terjadi berbagai peperangan yang sangat menyita seluruh elemen perjuangan, sehingga mereka pun tidak memiliki waktu untuk mengadakan pertunjukan amal. Selepas tahun 1947, masih dijumpai laporan pemasukan keuangan dari Fonds Kemerdekaan, namun

Februari 1946, 1 Maret 1946, dan 20 Maret 1946.

* Dompot Istimewa.	
Sek. Rakjat Djl. Oengaran	f 100,—
Perwari An. Tjab. Galoer, Adikarto Jg.	. 100,—
Perwari Patoek Gn. Kidoel Jogja	.. 100,—
Panitia Pembagian ba- rang2 Kl. Kadipira	.. 150,—
Djawatan Kehoetanan Jogjakarta	.. 150,80
Panitia Pertoendjoekan Amal L.R. Tockangan atas Panitia Keramaian Amal Serikat	.. 715,34
Sekerdja Pabrik Goela Tandjoengtirto	.. 306,59
SEMPROT.	

Figur 6. Daftar Pemasukan Fonds Kemerdekaan yang dimuat dalam kolom Dompot Istimewa. Sumber: *Kedaulatan Rakjat*, 25 Maret 1946.



Figur 7. Pertunjukan Amal di Yogyakarta yang ditujukan untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan sejak akhir 1945 hingga 1947.

dalam laporan tersebut tidak lagi ditemui pemasukan dari hasil pertunjukan amal. Hampir semua pemasukan berasal dari hibah.

Kesimpulan

Rakyat Yogyakarta pasca diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia terhanyut dalam gelora semangat kemerdekaan yang sudah lama dirindukan. Gelora rakyat yang mendukung kemerdekaan ini sejalan dengan sikap Sultan Buwana IX dan Paku Alam VIII yang juga mendukung penuh kemerdekaan Indonesia. Kedua tokoh pemimpin Yogyakarta ini berupaya mewadahi semangat mempertahankan kemerdekaan rakyat yang berapi-api melalui pembentukan Laskar Rakyat pada 26 Oktober 1945. Atmosfer kota Yogyakarta yang dilingkupi semangat rakyat dan pemimpinnya untuk mempertahankan kemerdekaan, mendukung lahirnya badan-badan perjuangan rakyat lainnya di Yogyakarta.

Badan-badan perjuangan yang muncul dan diikuti oleh rakyat Yogyakarta ini di antaranya adalah Laskar Rakyat, Fonds Kemerdekaan, dan Palang Merah Indonesia (PMI). Ketiga badan perjuangan tersebut di masa awal berdirinya membutuhkan modal untuk bergerak. Selain memanfaatkan hibah perorangan, kegiatan-kegiatan amal juga dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut dengan dukungan penuh dari rakyat sebagai upaya menggalang dana, termasuk dengan mengadakan pertunjukan amal.

Pertunjukan amal merupakan sebuah gelaran hiburan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk penggalangan dana atau amal. Pertunjukan amal ini dimanfaatkan oleh rakyat Yogyakarta untuk menggalang dana pada awal kemerdekaan hingga sekitar tahun 1947. Pemilihan pertunjukan amal sebagai media mobilisasi dana masyarakat adalah karena

efektivitasnya bahwa dengan pertunjukan amal, publik tidak hanya diminta untuk beramal, tetapi juga sekaligus mendapat hiburan berupa pertunjukan, sehingga terdapat timbal balik langsung atas amal yang diberikan.

Pertunjukan amal pertama di Yogyakarta diselenggarakan pada 14 November 1945 oleh Rukun Kampung Djogonegaran. Pertunjukan amal pertama ini merupakan sebuah sajian pertunjukan lakon sandiwara dengan cerita yang dibawakan "Pemberontakan Rakjat". Hasil dari pertunjukan ini sebagian diberikan kepada Fonds Kemerdekaan dan sebagian lagi untuk Laskar Rakyat Djogonegaran. Pada perkembangannya, pertunjukan amal tidak hanya berupa lakon sandiwara, tetapi juga berupa pertunjukan sulap, penayangan film bioskop dan pertunjukan musik keroncong.

Badan-badan perjuangan yang mendapatkan dana dari adanya pertunjukan amal ini di antaranya adalah Laskar Rakyat, Fonds Kemerdekaan, dan PMI. Sementara untuk alokasi terbanyak, didapat oleh Fonds Kemerdekaan dan paling sedikit oleh PMI. Selepas tahun 1947, intensitas penggalangan dana melalui pertunjukan amal mengalami penurunan drastis. Hal ini bisa jadi dikarenakan situasi keamanan dan ketertiban yang semakin genting akibat agresi militer Belanda sehingga tidak memungkinkan lagi diselenggarakannya pertunjukan amal. Selain itu, badan-badan perjuangan bisa jadi juga sudah memiliki pemasukan keuangan dari sumber yang lain, di antaranya dari hibah.

Referensi

Surat Kabar

- Kedaulatan Rakjat*, 10 November 1945.
- Kedaulatan Rakjat*, 17 November 1945.
- Kedaulatan Rakjat*, 21 November 1945.
- Kedaulatan Rakjat*, 7 Desember 1945.
- Kedaulatan Rakjat*, 17 Desember 1945.
- Kedaulatan Rakjat*, 20 Desember 1945.
- Kedaulatan Rakjat*, 24 Desember 1945.
- Kedaulatan Rakjat*, 25 Desember 1945.
- Kedaulatan Rakjat*, 7 Januari 1946.
- Kedaulatan Rakjat*, 18 Januari 1946.
- Kedaulatan Rakjat*, 24 Januari 1946.
- Kedaulatan Rakjat*, 7 Februari 1946.
- Kedaulatan Rakjat*, 12 Februari 1946.
- Kedaulatan Rakjat*, 13 Februari 1946.
- Kedaulatan Rakjat*, 15 Februari 1946.
- Kedaulatan Rakjat*, 21 Februari 1946.
- Kedaulatan Rakjat*, 22 Februari 1946.
- Kedaulatan Rakjat*, 26 Februari 1946.
- Kedaulatan Rakjat*, 28 Februari 1946.
- Kedaulatan Rakjat*, 2 Maret 1946.
- Kedaulatan Rakjat*, 4 Maret 1946.

Kedaulatan Rakjat, 6 Maret 1946.
Kedaulatan Rakjat, 7 Maret 1946.
Kedaulatan Rakjat, 13 Maret 1946.
Kedaulatan Rakjat, 20 Maret 1946.
Kedaulatan Rakjat, 21 Maret 1946.
Kedaulatan Rakjat, 25 Maret 1946.
Kedaulatan Rakjat, 28 Maret 1946.
Kedaulatan Rakjat, 1 April 1946.
Kedaulatan Rakjat, 5 April 1946.
Kedaulatan Rakjat, 6 April 1946.
Kedaulatan Rakjat, 30 April 1946.
Kedaulatan Rakjat, 4 Mei 1946.
Kedaulatan Rakjat, 15 Mei 1946.
Kedaulatan Rakjat, 17 Mei 1946.
Kedaulatan Rakjat, 28 Juni 1946.
Kedaulatan Rakjat, 1 Agustus 1946.
Kedaulatan Rakjat, 26 Agustus 1946.
Kedaulatan Rakjat, 15 Januari 1947.
Kedaulatan Rakjat, 23 Januari 1947.
Kedaulatan Rakjat, 29 Januari 1947.
Kedaulatan Rakjat, 31 Januari 1947.
Kedaulatan Rakjat, 14 Maret 1947.
Kedaulatan Rakjat, 8 Agustus 1947.
Kedaulatan Rakjat, 12 September 1947.
Kedaulatan Rakjat, 19 September 1947.
Kedaulatan Rakjat, 21 Oktober 1947.
Kedaulatan Rakjat, 23 Desember 1947.

Buku, Jurnal, Makalah, dan Skripsi

- H. Nasution (1977). *Sekitar perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 2: Diplomasi atau Peperangan*. Bandung: Disjarah AD dan Angkasa.
- Amrin Imran (2012). "Partai, Laskar, dan Tentara Pelajar", dalam Taufik Abdullah dan A.B. Lopian (eds.), *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 6: Perang dan Revolusi*. Jakarta: PT Ichtisar Baru van Hoeve.
- Andi Suwirta (2015). *Revolusi Indonesia dalam News and Views: Sebuah Antologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Barahmus (1985). *Yogya Benteng Proklamasi*. Jakarta: Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogya, Perwakilan Jakarta.
- Farida Ariyani (2002). Sumber-sumber Dana Perjuangan Pemerintah Republik Indonesia pada Masa Revolusi 1945-1949. *Skripsi*. Depok: Universitas Indonesia.
- Oey Beng To (1991). *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I*. Jakarta: LP3ES.
- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (1988). *Dasawindu DR. H. R. Soeharto*. Jakarta: Yayasan Penerbit Ikatan Dokter Indonesia.
- Ryadi Goenawan dan Darto Harnoko (1983). *Sejarah Sosial Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta: Mobilitas Sosial DI. Yogyakarta Periode Awal Abad Duapuluhan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Selo Soemardjan (2009). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Cetakan kedua. Jakarta:

- Komunitas Bambu.
- Soehartono WP, dkk. (2002). *Yogyakarta Ibu Kota Republik Indonesia*. Yogyakarta: Tim Penulis dan Yayasan Soedjatmoko.
- Susanto Zuhdi (2012). "Proklamasi Kemerdekaan", dalam Taufik Abdullah & A. B. Lopian (Eds.), *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 6: Perang dan Revolusi*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- P. J. Suwarno (1988). Birokrasi dan Gerakan Rakyat di Yogyakarta (1945-1946). *Makalah* disampaikan pada Seminar Sejarah Masa Revolusi 1945-1949 Masyarakat Sejarawan Indonesia Yogyakarta dan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. 22-23 Agustus, Yogyakarta.
- Tashadi, dkk. (1992). *Peranan Desa dalam Perjuangan Kemerdekaan: Studi Kasus Keterlibatan Beberapa Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1945-1949*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Uji Nugroho Winardi (2017). "Rakyat Bergerak, Djogja Bergelora: Mobilisasi Tenaga Perang Masa Revolusi", dalam Sri Margana, dkk., *Gelora di Tanah Raja: Yogyakarta pada Masa Revolusi*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Internet

- Palang Merah Indonesia (t.t). *Sejarah Singkat*. Palang Merah Indonesia – Bergerak Bersama untuk Sesama. Diakses pada 26 Februari 2020 pukul 17.07 WIB melalui laman <https://pmi.or.id/>.

Lampiran

Daftar Pertunjukan Amal yang Mengalokasikan untuk Badan Kelaskaran dan Fonds Kemerdekaan

No	Jenis Pertunjukan	Tema Pertunjukan	Pelaksanaan	Alokasi	
				Badan Kelaskaran	Fonds Kemerdekaan
1	Sandiwara	Pemberontakan Rakjat	14 November 1945	50%	50%
2	Sulap	-	18 November 1945	-	100%
3	Sandiwara	Bende Mataram	24 November 1945	-	100%
4	Sandiwara	Lahir Bintang Madjapait	10 Desember 1945	50%	50%
5	Sandiwara	Tjalon Srikandi	21 Desember 1945	-	100%
6	Film	The Thief of Bagdad	17 Januari 1946	-	100%
7	Sandiwara	Perdjoeangan Wanita	25 Januari 1946	-	50%
8	Film	If I Were King	4 Februari 1946	55%	-
9	Sandiwara	Senjoeman Sang Merah Putih	15 Februari 1946	25%	10%
10	Sandiwara	Banteng Banten Kisah Brontakan Banten	16 Februari 1946	25%	10%
11	Sandiwara	-	23-24 Februari 1946	20%	15%
12	Sandiwara	Barisan Djenggot	25-26 Februari 1946	50%	10%

13	Film	Pilem 1001 Malam	26-27 Februari 1946	50%	50%
14	Sandiwara	Babad Bangka	28 Februari 1946 dan 1 Maret 1946	75%	25%
15	Sandiwara	Djiwa Pemoeda dan Pemoeda Ra'jat	2-5 Maret 1946	25%	-
16	Sandiwara	Matinja Harjo Penangsang	6 Maret 1946	50%	35%
17	Sandiwara	Senjoeman Sang Merah Putih	9-10 Maret 1946	20%	40%
18	Keroncong	-	19-20 Maret 1946	10%	-
19	Sandiwara	Drama Pembelaan	22 Maret 1946	50%	20%
20	Sandiwara	Petjah sebagai Ratna	23 Maret 1946	50%	20%
21	Sandiwara	Panggilan Iboe Pertiwi	24-25 Maret 1946	75%	25%
22	Sandiwara	Arijo Penangsang	30-31 Maret 1946	65%	20%
23	Sandiwara	Troenodjojo	31 Maret dan 1 April 1946	65%	20%
24	Sandiwara	Brontak	2-3 April 1946	65%	-
25	Film	Murder in New York	2 Mei 1946	100%	-
26	Sandiwara	Senjoeman Sang Merah Putih	18 Mei 1946	-	100%
27	Sandiwara	Lasjkar Srikandi	29 Mei 1946	-	100%
28	Sandiwara	Hampir Malam Di Jogja	17 Januari 1947	-	100%
29	Sandiwara	Panggilan Bangsa	25 Januari 1947	-	100%
30	Sandiwara	Revoloesi Soelawesi	29-30 Januari 1947	-	100%
31	Sandiwara	Karena Asmara	31 Januari 1947	-	100%
32	Sandiwara	Bajangan Waktu Fadjar	28 Agustus 1947	100%	-
33	Sandiwara	Ibu Pertiwi	13 September 1947	100%	-
34	Film	Sleepless Night	22-23 Oktober 1947	-	100%
35	Sandiwara	Kenang-kenangan	25-26 Desember 1947	100%	-